

BAB III

KEHIDUPAN NYAI DI PRIANGAN TENGAH TAHUN 1900-1942

3.1 Munculnya Keberadaan Nyai di Priangan Tengah

Politik pintu terbuka juga menjadi salah satu pengaruh meningkatnya jumlah pegawai-pegawai Eropa yang datang ke Hindia-Belanda. Aktivitas perekonomian yang berkembang di sektor perkebunan, industri pengolahan serta industri pertambangan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 juga menjadikan migrasi pegawai maupun pejabat Eropa menuju Hindia Belanda semakin mudah. Sebagian besar imigran Eropa pada mulanya merupakan golongan militer yang disesuaikan dengan kondisi peperangan yang terjadi di Hindia Belanda. Namun, setelah diberlakukannya politik pintu terbuka yang mana pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor meningkat di akhir abad 19 dan awal abad 20, maka kemunculan imigran dari kapitalis maupun profesional sipil Eropa semakin meningkat jumlahnya.⁷⁴

Jumlah perempuan di Priangan dari tahun 1920 sampai tahun 1930 mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun jumlah perempuan meningkat secara signifikan dari 24.329 hingga 38.168. Namun, peningkatan jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia Belanda terutama Priangan masih belum dapat mengimbangi jumlah laki-laki Eropa. Jumlah kaum perempuan Eropa tetap lebih sedikit di antara jumlah laki-laki Eropa. Perbandingan jumlah

⁷⁴ Bedjo Riyanto, *Iklan surat kabar dan perubahan masyarakat di Jawa masa kolonial, 1870-1915* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2000) hlm 40.

perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Priangan melalui sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Eropa Di Priangan Pada Tahun 1920 Dan 1930⁷⁵

Wilayah	Tahun 1920		Tahun 1930	
	L	P	L	P
Jawa Barat	30.098	24.329	42.606	38.168

Sumber: Koleksi KITLV, Volkstelling 1930 = Census of 1930 in Netherlands India Inheemsche bevolking van West-Java/ Native Population in West - Java.

Selain menimbulkan arus modernisasi gaya hidup, meningkatnya jumlah orang-orang Eropa ke Hindia Belanda terutama Priangan menyebabkan keberadaan fenomena nyai juga semakin berkembang. Praktik nyai sebenarnya telah terjadi di kalangan para pedagang Asia maupun Portugis ketika jumlah kaum wanita Eropa tidak sebanding dengan jumlah kaum pria Eropa.⁷⁶ Terbatasnya jumlah perempuan Belanda di Nusantara menyebabkan praktik nyai terjadi sejak pembentukan VOC di Batavia.

Fenomena nyai yang semakin berkembang di Hindia Belanda termasuk Priangan yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah perempuan Eropa di Hindia Belanda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan pribumi hanya dilihat sebagai objek yang ditempatkan dalam posisi marginal yang dijadikan sebagai istri

⁷⁵ Pada penelitian ini wilayah Priangan mengacu kepada wilayah keresidanan Priangan yang meliputi Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Sensus ini dicatat sebelum tahun 1930 yang mana pada tahun 1930 wilayah administrative ini telah berubah menjadi Jawa Barat (*West Java*). Meskipun terjadi perubahan wilayah administratif, namun pada penelitian ini tetap menggunakan nama Priangan untuk mempertahankan fokus penelitian dan kultural.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 7.

tidak resmi. Nyai tidak hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan biologis pria Eropa, tetapi peran dalam struktur sosial juga dibatasi. Hal ini selaras dengan teori gender Anna Oakley bahwa keberadaan nyai dalam masyarakat kolonial dapat dipahami sebagai peran dari hierarki sosial serta norma maupun aturan gender yang berlaku dalam masyarakat patriarki era kolonial.⁷⁷

3.2 Posisi Nyai dalam Struktur Keluarga Kolonial



Gambar 3.1 Potret studio Tuan van der Velden bersama putrinya Johanna van der Velden dan istrinya atau nyai di Bandung

Sumber: Koleksi KITLV, tahun 1900, diakses pada 31 Juli 2025

Fenomena nyai yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks, sebab mencerminkan interaksi antara kekuasaan kolonial, gender maupun budaya. Perempuan yang diambil atau secara sukarela menjadi nyai tentunya hidup bersama pria Eropa tanpa adanya ikatan pernikahan resmi. Perbedaan status sosial, ras, serta agama menjadi alasan umum

⁷⁷ Oakley, *Op. Cit.*, hlm 28.

terjadinya praktik pernyaaian. Selain itu, para pegawai Eropa yang datang ke Hindia Belanda biasanya tidak membawa istri dari negeri asalnya sehingga memelihara nyai menjadi solusi untuk mengurus rumah tangga dan sebagai teman tidur. Meskipun begitu, nyai tetap memerankan peran penting dalam rumah tangga kolonial dan menjadi lambang dari subordinasi perempuan pribumi terhadap kekuasaan kolonial.⁷⁸

Ketika masa Hindia-Belanda pernyaaian sering kali menimbulkan masalah, meskipun pada masa ini lebih terorganisir dan sistematis. Para perempuan pribumi yang menjadi nyai pada awalnya dipekerjakan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga para pegawai Eropa namun seiring berjalannya waktu pekerjaan mereka tak hanya seputar mengurus dapur melainkan menjadi teman sang tuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan kekuasaan atau dominasi antara pegawai Eropa sebagai majikan dengan budak perempuannya sehingga fenomena nyai berubah menjadi suatu sistem yang sulit untuk dihapuskan. Selama masa pemerintah kolonial Belanda kebiasaan pegawai Eropa untuk memelihara nyai terus berlanjut sebab sistem ini dilanjutkan oleh orang-orang Indo atau keturunan dari nyai tersebut.⁷⁹

Adanya keterlibatan peran orangtua dalam praktik nyai, seperti orang tua yang menyerahkan anak perempuannya secara sukarela untuk menjadi nyai demi mencukupi kehidupan keluarganya. Namun, ada juga nyai yang berasal dari

⁷⁸ Hendra Kurniawan, "Nyai Dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo Di Hindia Belanda," *Historia Vitae*. Vol 28, no. 2. (2014) hlm 139.

⁷⁹ Baay, *Op. cit.* hlm 1.

keluarga priyayi, sebagai jaminan dalam mengamankan jabatan sang ayah.⁸⁰ Perempuan yang dipilih menjadi nyai tentunya mempunyai pekerjaan yang berbeda dengan buruh perempuan yang bekerja di perkebunan. Jika perempuan yang bekerja di perkebunan harus bertarung dengan teriknya matahari, memilih daun tembakau, teh atau pun menyadap karet di perkebunan milik orang Eropa sedangkan nyai mengurus rumah tangga seperti memasak, mengawasi kerja para pembantu rumah tangga, serta harus siap dalam melayani hasrat serta nafsu majikan mereka.⁸¹ Seseorang nyai mungkin beranggapan bahwa dirinya merasa mempunyai hak istimewa, akan tetapi pada kenyataannya mereka hidup dalam keseharian yang penuh kerja berat, nafsu seksual yang murahan serta penghinaan yang harus siap diterimanya seperti kafir, pemakan babi dan peminum *jenever*.⁸²

Hidup dalam bayang-bayang kemewahan yang diberikan oleh sang tuan, namun pada kenyataannya nyai merupakan pembantu rumah tangga dengan status yang ambigu, ibu rumah tangga, istri, maupun pelacur. Selain mengatur segala kebutuhan rumah tangga, nyai juga berperan layaknya istri dari laki-laki Eropa. Layaknya suami istri, nyai yang tinggal seataap dengan tuan Eropa melakukan makan bersama, tidur bersama dan jika beruntung seorang nyai akan mendapat cinta dari Tuan nya, akan tetapi seorang nyai tetap tidak akan mempunyai status yang sama dengan tuannya. Kehidupan ini tak pelaku layaknya perbudakan yang terjadi dalam rumah tangga. Tidak adanya status resmi perkawinan antara nyai dan

⁸⁰ Muniroh Laila Magfirul, Sutiya, dan Dadan Adi Kurniawan, "Peranan Nyai Dalam Akulturasi Budaya Jawa-Belanda Tahun 1870-1942," *Jurnal Candi*. Vol. 23, no. 2 (2023) hlm 51

⁸¹ France Gouda, *Op. Cit.*, hlm 198.

⁸² *Jenever*, *genever*, atau disebut juga dengan gin merupakan minuman keras dengan aroma juniper, pohon yang tumbuh subur di Belanda.

tuan nya menyebabkan nyai tidak memperoleh perlindungan hukum atas apapun, mereka harus bisa menjaga dirinya sendiri.⁸³ Jika seorang nyai telah membuat perjanjian dengan sang tuan maka tidak akan ditinggalkan begitu saja, sebaliknya nyai akan ditinggalkan oleh sang tuan ketika sudah tidak lagi dibutuhkan.

Status nyai dalam keluarga kolonial dianggap sebagai sebuah perabot pribumi tanpa daya. Banyak penyair kolonial yang menggambarkan seorang nyai seperti seekor anjing yang patuh nan setia dan dengan sabar menunggu di kaki tuannya agar mendapatkan tatapan maupun usapan di punggungnya. Selain itu, seorang nyai harus menanggung kemarahan sang tuan apabila sang tuan merasa frustrasi ketika menghadapi kehidupannya atau telah menenggak alkohol terlalu banyak ketika merayakan ulang tahun ratu Wilhelmina. Ketika perempuan pribumi menjadi seorang nyai, maka harus siap untuk memperoleh stereotip sebagai ”perilaku zina tak bermoral” ataupun ”karakter yang rendah”.⁸⁴

Hubungan yang timpang antara nyai dan pria Eropa membuat nyai seringkali mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal. Kekerasan ini diakibatkan oleh sistem tatanan sosial kolonial yang patriarki juga rasialis sehingga hubungan antara nyai dan tuannya tak hanya mengenai gender namun hubungan kolonial. Sebuah laporan dalam surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* menunjukkan adanya kekerasan yang dialami oleh seorang nyai:

Baik sang ayah maupun sang anak memukul perempuan tak berdaya itu dengan penuh nafsu. Ketika mereka merasa kelelahan setelah memukul, sang korban pun telah berlumuran darah dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Kemudian ia diancam akan dibunuh jika sekali lagi mengeluh. Lalu ia diperintahkan untuk mencuci

⁸³ Baay, *Op. Cit.*, hlm 63.

⁸⁴ Gouda, *Op. Cit.* hlm 205.

sendiri pakaiannya yang penuh darah di sumur untuk menghilangkan bekas-bekas penganiayaan.⁸⁵

Kekerasan oleh nyai tersebut menggambarkan bahwa sistem kolonial dapat membuat pria Eropa bertindak secara sewenang-wenang kepada perempuan pribumi tanpada adanya sanksi berupa hukuman. Praktik ini memberikan gambaran mengenai budaya patriarki kolonialisme bisa memperparah posisi nyai sebagai subjek yang tertindas dalam keluarga kolonial

Posisi nyai dalam struktur keluarga kolonial menggambarkan adanya hubungan yang kompleks antara gender serta kolonialisme. Nyai mengalami eksploitasi secara seksual maupun peran domestik tanpa adanya perlindungan hukum. Hubungan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ann Oakley bahwa perbedaan gender dibedakan melalui konstruksi sosial dan nilai-nilai patriarki sehingga nyai dipandang sebagai objek rentan dalam keluarga kolonial.⁸⁶ Selain teori gender, teori kolonialisme yang dipaparkan oleh Loomba juga berperan dalam menggambarkan posisi nyai sebab hierarki kolonial membuat nyai sebagai pasangan tanpa hak yang menunjukkan adanya eksploitasi berdasarkan ras dan gender.⁸⁷ Data dari *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers* yang menjelaskan bahwa nyai dapat dengan mudah ditinggalkan dan tidak mempunyai hak apapun, memperkuat bahwa posisi nyai memang tak berdaya.⁸⁸

Posisi nyai dalam struktur keluarga kolonial mengalami dinamika, walaupun perubahan tersebut tidak secara menyeluruh. Di awal periode nyai diketahui berasal

⁸⁵ Baay, *Op. Cit.*, hlm 61.

⁸⁶ Oakley, *Op. Cit.*, hlm 8.

⁸⁷ Loomba, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁸⁸ "Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers," *Drukkerij Volkslectuur, Weltevreden*, April 1923.

dari kelas cacah yang mengurus kebutuhan rumah tangga tuannya dan menjalani hubungan seksul maupun domestik dalam ikatan tidak resmi. Ketika politik pintu terbuka mulai berlaku yang menyebabkan meningkatnya jumlah pegawai sipil Eropa, membuat hubungan nyai melibatkan aspek ekonomi rumah tangga yang lebih kompleks. Nyai tidak lagi menjadi pelayan namun menjadi pengelola rumah tangga seperti mengelola keuangan, perkebunan, usaha kecil keluarga, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, perubahan yang terjadi terhadap posisi nyai dalam struktur keluarga kolonial bersifat tidak pasti. Mengalami peningkatan fungsi rumah tangga serta peran sosial tertentu, akan tetapi tetap tidak diakui secara hukum maupun sosial. Nyai tetap dilihat sebagai perempuan sementara yang berada dalam luar struktur keluarga resmi.

Dalam kehidupan sehari-hari nyai hidup dengan menggunakan pakaian kebaya berwarna putih serta sarung batik, dan terompah atau selop yang menyelimuti kakinya. Tingkat kesejahteraan tuannya dapat dilihat dari barang-barang yang dipakai oleh nyai. Ketika seorang nyai memiliki anak dari hasil hubungannya maka dia tidak mempunyai hak dalam pemberian nama maupun merawat anak tersebut. Selain tidak mempunyai hak atas anak yang dilahirkan, nyai oleh sebagian penduduk kolonial masih disalahkan karena dianggap menurunkan martabat dari putri mereka yang lahir dengan warna kulit seperti buah zaitun.⁸⁹ Tak hanya itu, ketika sang tuan memutuskan untuk kembali ke Eropa, nyai tidak lagi mempunyai hak dalam merawat maupun membesarkan anaknya.⁹⁰ Hal ini membuat

⁸⁹ Gouda, *Op. Cit.*, hlm 201.

⁹⁰ Mutiah Amini, "Kehidupan Perempuan di Tengah Perubahan Kota Surabaya Pada Awal Abad Ke-20." (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003) hlm 87.

posisi nyai sangat rendah di mata tuannya sendiri. Hanya sedikit tuan Eropa yang benar-benar memiliki rasa cinta terhadap nyai.

3.3 Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Praktik Nyai

Datangnya bangsa Barat ke Nusantara yang dimulai sejak bangsa Portugis, Spanyol, Belanda sampai Inggris tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem pernyaaian. Tumbuh suburnya praktik pernyaaian di Nusantara disebabkan oleh banyaknya para pegawai VOC yang masih lajang lalu adanya hubungan yang kuat antara majikan dengan nyai membuat praktik ini menjadi suatu sistem yang sulit untuk diberantas. Selain itu, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah turut serta dalam melanggengkan praktik pernyaaian hingga bertahun-tahun lamanya.

Berbagai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial seringkali tidak selalu konsisten. Ada kalanya praktik nyai ini ditentang keras sebab dianggap perilaku janggal, tidak terkendali serta dapat membahayakan kepentingan kolonial. Namun, disisi lain terdapat beberapa alasan yang dianggap menguntungkan pemerintah kolonial sehingga pada kenyataannya praktik ini tetap berlangsung. Adanya perubahan dalam sistem ini bergantung terhadap keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah kolonial. Jauh sebelum VOC datang, fenomena nyai telah berlangsung, tepatnya ketika datangnya bangsa Portugis serta Spanyol pada abad 16. Ketika masyarakat kolonial Portugis menetap di Nusantara, nyai merupakan ciri penting dari masyarakat tersebut. Hal ini terjadi sebab terbatasnya jumlah perempuan Portugis yang dikirim ke Timur. Sekitar tahun 1505-1515 ketika Raja Muda Dom Fransisco de Almeda lalu penggantinya Alfonso de Albuquerque

mengizinkan terjadinya perkawinan antara para serdadu dengan perempuan-perempuan pribumi. Pengambilan nyai semacam ini masih bertahan sampai bangsa Belanda datang ke Nusantara.⁹¹

a) Peraturan Kolonial Terhadap Pernikahan Campuran

Lelaki Eropa cenderung menikahi perempuan pribumi, namun pernikahan ini terkadang dapat menarik perhatian secara luas karena masih jarang terjadi dan bahkan butuh persetujuan khusus dari gubernur jenderal. Pernikahan campuran biasanya terjadi menurut tradisi Kristen sebab pada masa itu VOC belum mengeluarkan hukum secara pasti mengenai pernikahan campuran tersebut.⁹² Pluralisme yang terjadi pada masyarakat Hindia Belanda pada masa itu menurut pemerintah Belanda perlu mendapat perhatian yang cukup. Perkawinan campuran pada masa kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S.* 1898 No. 158 yang disingkat G.H.R). Menurut pasal 1 GHR mengenai "Perkawinan Campuran"⁹³ dinyatakan sebagai berikut: "Yang dinamakan Perkawinan Campuran, adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan"

Adapun hukum berlainan yang dimaksud adalah hukum yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan, agama, kependudukan, golongan rakyat, tempat tinggal dan wilayah. Peraturan ini dibuat sebagai respons dari rasa khawatir masyarakat Eropa terkait pernikahan antar ras. Aturan ini juga berperan dalam

⁹¹ Leonardo Blusse, *Persekutuan Aneh Pemukim Cina Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia*, ed. Abdur Rozaki (Yogyakarta: LKiS, 2004) hlm 300.

⁹² Ali Akbar et al., "Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8, no. 1 (2024) hlm 4450.

⁹³ "Staatsblad 1898 No.158, Regeling En De Zoogenaamde Gemengde Huwelijken."

mengatur perkawinan antar golongan yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum yang timbul akibat perkawinan antar golongan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perempuan yang menikahi pria dari golongan yang berbeda maka akan mendapatkan status kewarganegaraan suaminya.⁹⁴

Praktik nyai yang melibatkan lelaki Eropa dengan seorang perempuan pribumi merupakan sebuah perkawinan campuran. Dikatakan perkawinan campuran sebab keduanya memiliki perbedaan ras, kewarganegaraan, agama serta golongan yang berbeda. Maka dari itu, perkawinan campuran dibedakan dalam beberapa jenis yaitu perkawinan internasional, perkawinan campur antar-tempat perkawinan campuran antar golongan serta perkawinan campuran antar-agama.⁹⁵

1) Perkawinan Campuran antar tempat

Perkawinan campuran antar tempat merupakan perkawinan campuran tertua dari berbagai macam perkawinan campuran di Indonesia. Adapun arti dari perkawinan campuran ini adalah perkawinan di antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku bangsa atau daerah yang berbeda lalu hidup dengan lingkungan hukum yang juga berbeda. Misalnya perkawinan antara lelaki Padang dengan perempuan Sunda, seorang Batak dengan Jawa dan lainnya.

2) Perkawinan Campuran Antar agama

Perkawinan campuran antar-agama dapat diartikan sebagai sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan agama yang berbeda. Dalam mengadakan perkawinan yang dilihat oleh aturan hukum pada masa kolonial

⁹⁴ Ali Akbar et al.” *Loc. Cit.*

⁹⁵ Tiurma Magihut Pitta Allagan, “Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2009) hlm 178.

bukanlah dari sisi agama. Namun, dilihat dari agama yang dianut oleh penguasa pada waktu itu adalah agama Kristen sehingga dijadikan pedoman dalam melakukan perkawinan campuran. Agama digunakan untuk melindungi golongan Belanda.

Perbedaan agama tak menjadi halangan dalam sebuah perkawinan campuran. Sumber lain mengatakan bahwa perkawinan campuran antar agama merupakan Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani Djawa, Minahasa, serta Amboina, S. 1933/74 (HOI). Bahwa peraturan GHR berlaku untuk perkawinan orang-orang Kristen dengan bukan Kristen sesama orang Indonesia.

Masyarakat Hindia Belanda menganggap orang yang beragama Kristen merupakan bagian dari kasta tertinggi dalam tatanan sosial. Status keturunan, naiknya status sosial dapat terjadi apabila seseorang memeluk agama Kristen. Di Hindia Belanda posisi agama memiliki peran penting dalam menentukan status sosial. Di mata masyarakat Eropa, seorang pribumi Kristen akan lebih bisa dalam memperoleh kedudukan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap berkembangnya praktik pernyaaian yang disebabkan oleh adanya larangan untuk menikahi perempuan pribumi non-Kristen karena jika menikah maka pelaksanaannya dipersulit.

3) Perkawinan Campuran Antar golongan

Perkawinan campuran antar-golongan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang patuh kepada hukum yang berbeda. Jika seseorang dari golongan pribumi menikah dengan seseorang yang berasal dari golongan Eropa atau Timur Asing, maka pernikahan tersebut disebut sebagai

pernikahan campuran antar-golongan sebab kedua pengantin patuh terhadap sistem hukum yang berbeda. Konsep ini dipahami dalam konteks sejarah Indonesia, terutama masa kolonial. Dalam periode tersebut, masyarakat Hindia-Belanda dibagi ke dalam beberapa golongan sosial yaitu Bumiputera, Timur Asing, serta Eropa.

Hubungan antara ketiga kelompok ini tidak hanya ditentukan oleh perbedaan ras, namun juga didukung oleh faktor sosial, ekonomi, maupun politik. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan berperan sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Pengelompokan ini menimbulkan diskriminasi rasial yang muncul dalam berbagai bentuk, seperti hanya orang Eropa yang dapat menikmati fasilitas terbaik sedangkan pribumi seringkali hanya diizinkan untuk bekerja di bidang yang menuntut kategori kasar.⁹⁶

Batas-batas ras yang kaku serta kontak sosial yang terbatas dari individu yang berbeda kasta membuat perkawinan campuran secara terang-terangan tidak banyak terjadi karena dianggap menyalahi hubungan antara kasta. Akibatnya, hubungan antara perempuan pribumi dengan lelaki Eropa sering terjadi dalam bentuk praktik nyai dibandingkan perkawinan secara resmi. Praktik nyai dianggap sebagai alternatif yang lebih mudah serta tidak melalui persyaratan hukum yang rumit dan tentunya tetap menjaga status sosial pria Eropa.

Dengan demikian, pembagian golongan dalam hukum kolonial secara tidak langsung mendorong adanya praktik pernyiaan sebab hubungan resmi antar golongan dihambat oleh aturan hukum kolonial yang diskriminatif.⁹⁷ Peraturan

⁹⁶ Annisa Aprilia et al., "Konstruksi Rasial Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial," *JAHE - Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*. Vol. 1, no. 2 (2024) hlm 731.

⁹⁷ Ann Laura Stoler, "Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule," *The New Imperial Histories Reader*. September (2020) hlm 63.

pernikahan campuran pada masa kolonial secara sistematis memperlihatkan adanya dominasi kekuasaan yang bersifat diskriminasi kelas maupun ras. Kondisi tersebut selaras dengan teori kolonialisme Loomba bahwa kolonialisme membentuk hierarki sosial yang melibatkan banyak lapisan sosial seperti hukum, budaya dan kepentingan ekonomi, tak hanya penaklukan wilayah.⁹⁸ Fenomenai nyai menjadi bukti bahwa sistem kolonial mengatur hubungan sosial namun tetap membuat batas-batas sosial yang menguntungkan pihak kolonial. Di Priangan tengah terutama daerah Cimahi terjadi pernikahan antar golongan seperti yang terjadi pada nyai Itih yang dinikahi oleh tuannya yang bernama Wilraven seorang anggota militer KNIL yang kemudian menjadi jurnalis pada era kolonial.⁹⁹

⁹⁸ Loomba, *Op. Cit.*, hlm 21.

⁹⁹ Bij alles wat hij schreef dacht hij aan Itih. *P. den Hengst en Zoon*. 1966, 26 Oktober.